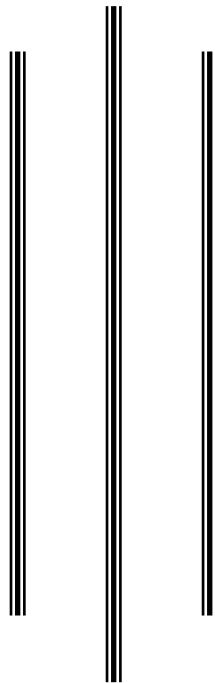




LAPORAN KINERJA (LK)
BIRO BINA PEREKONOMIAN SETDA PROVSU
TAHUN 2018



Jln. P. Diponegoro No. 30
Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Berkat dan Rahmat-Nya Laporan Kinerja Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU ini disusun dengan mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *Good Governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, Laporan Kinerja Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU Tahun Anggaran 2018 dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan serta merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Demikian Laporan Kinerja Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 disusun, semoga bermanfaat sebagai bahan masukan dan umpan balik perbaikan kualitas organisasi dan pemerintah daerah.

Medan, 14 Februari 2019

KEPALA BIRO BINA PEREKONOMIAN
SETDAPROVSU



Ernita Bangun, SE, MAP
Pembina Utama Muda
NIP 196103271981032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Bina Perekonomian	3
E. Sumber Daya Manusia	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Perencanaan Kinerja	10
B. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2018	13
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018	14
C. Realisasi Anggaran	34
D. Pengungkapan Perbaikan Kinerja Selanjutnya	36
BAB IV PENUTUP	38

Daftar Tabel:

Tabel 1.1	Jumlah SDM Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu Tahun 2018 berdasarkan jenjang jabatan.
Tabel 1.2	Jumlah SDM Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu Tahun 2018 berdasarkan strata pendidikan.
Tabel 1.3	Jumlah SDM Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu Tahun 2018 berdasarkan golongan.
Tabel 1.4	Jumlah SDM Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu Tahun 2018 berdasarkan jenis kelamin

Tabel 3.1	Indikator Kinerja Utama.
Tabel 3.2	Klasifikasi Capaian Kinerja
Tabel 3.3	Perbandingan target dan realiasi capaian kinerja Tahun 2018.
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017.
Tabel 3.5	Perbandingan target 2018 dengan Target Renstra.
Tabel 3.6	Perbandingan kebutuhan jumlah anggaran dan jumlah SDM tahun 2018 dan tahun 2017 .
Tabel 3.7	Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menurut jenisnya di Sumatera Utara Tahun 2018.
Tabel 3.8	Realisasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2017.
Tabel 3.9	Perbandingan inflasi Sumut dengan inflasi Nasional.
Tabel 3.10	Realisasi Program/Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama TA. 2018.
Tabel 3.11	Perbandingan Deskripsi Realisasi Anggaran dengan Realisasi Capaian Kinerja.

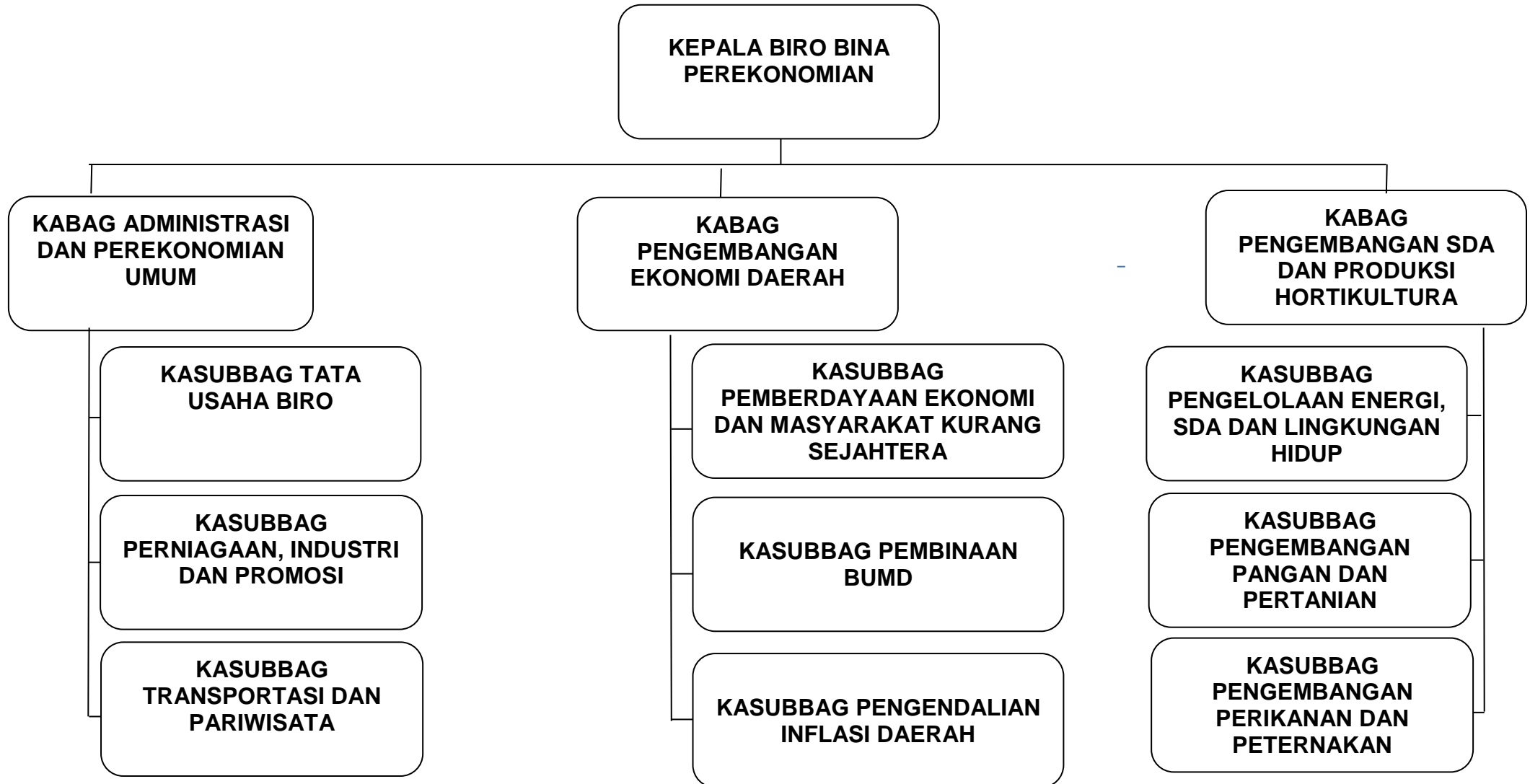
Daftar Grafik :

Grafik 1.1	Jumlah SDM berdasarkan jenjang jabatan.
Grafik 1.2	Jumlah SDM berdasarkan strata pendidikan.
Grafik 1.3	Jumlah SDM berdasarkan Golongan.
Grafik 1.4	Jumlah SDM berdasarkan jenis kelamin.
Grafik 3.1	Perbandingan Realisasi tahun 2018 dengan tahun 2017.
Grafik 3.2	Perbandingan Persentase Realisasi Pupuk Tahun 2017 dengan Tahun 2018
Grafik 3.3	Perkembangan Inflasi Sumut dan Inflasi Nasional

Lampiran:

1. Struktur Organisasi Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu.
2. Penetapan Kinerja Tahun 2018.

STRUKTUR ORGANISASI BIRO BINA PEREKONOMIAN SETDAPROVSU



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan bertanggung jawab (*good governance*) diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan komitmen nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, dan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu Tahun 2018 sebagai wujud akuntabilitas capaian kinerja Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu selama tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu Tahun 2018 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu Tahun 2018. Laporan Kinerja Tahun 2018 juga merupakan alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

B. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja (LK) ini adalah:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara;

2. Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tabahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
4. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
6. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 061/405/ORG Tanggal 15 Januari 2019 Hal : Penyampaian Laporan Kinerja (LK) OPD Tahun 2018.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu Tahun 2018 adalah dalam rangka mewujudkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai media pertanggungjawaban Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu atas tingkat keberhasilan program/kegiatan dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018 dan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Tahun 2018.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Peningkatan kinerja yang memiliki kualitas dan profesionalisme yang sesuai dengan tuntutan tugas, tanggung jawab dan kewajiban yang efektif, efisien dan responsive;
- c. Sebagai umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan dan program kerja yang diperlukan untuk peningkatan kinerja Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu selanjutnya;
- d. Memaparkan gambaran pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu mencakup realisasi pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu mempunyai tugas membantu Sekdaprovsu dalam menyusun kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan atas pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pengembangan di bidang Administrasi dan Perekonomian Umum, pengembangan Ekonomi Daerah dan pengembangan Sumber Daya Alam dan Produksi Hortikultura.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Bina Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

1. Menyiapkan dan mengkoordinasikan konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian Administrasi dan Perekonomian Umum, pengembangan Ekonomi Daerah dan pengembangan Sumber Daya Alam dan Produksi Hortikultura.
2. Menyelenggarakan fasilitasi monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian Administrasi dan Perekonomian Umum, pengembangan Ekonomi Daerah dan pengembangan Sumber Daya Alam dan Produksi Hortikultura.

Kepala Biro Bina Perekonomian mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin kepada staf pada lingkup Biro Bina Perekonomian.
2. Menyelenggarakan pengolahan, penetapan dan penyajian bahan/data dalam melaksanakan kegiatan perekonomian daerah.
3. Menyelenggarakan rumusan perencanaan dan program kegiatan di bidang Administrasi dan Perekonomian Umum, Pengembangan Ekonomi Daerah dan pengembangan Sumber Daya Alam dan Produksi Hortikultura.
4. Menyelenggarakan perumusan standar, norma dan kriteria penyelenggaraan pengembangan perekonomian di bidang Administrasi dan Perekonomian Umum, pengembangan Ekonomi Daerah dan pengembangan Sumber Daya Alam dan Produksi Hortikultura.
5. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian di bidang Administrasi dan Perekonomian Umum, Pengembangan Ekonomi Daerah dan pengembangan Sumber Daya Alam dan Produksi Hortikultura.

6. Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengembangan perekonomian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Menyelenggarakan perumusan kebijakan umum penyelenggaraan pengembangan perekonomian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Menyelenggarakan rapat - rapat dengan SKPD teknis terkait dengan Administrasi dan Perekonomian Umum, Pengembangan Ekonomi Daerah dan pengembangan Sumber Daya Alam dan Produksi Hortikultura.
9. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyelenggaraan Administrasi dan Perekonomian Umum, pengembangan Ekonomi Daerah dan pengembangan Sumber Daya Alam dan Produksi Hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Menyelenggarakan hubungan kerja sama antar satuan perangkat daerah, instansi vertikal/ terkait, antar lembaga dan antar Kabupaten/Kota.
11. Memberi masukan berupa telaahan staf terkait dengan Administrasi dan Perekonomian Umum, pengembangan Ekonomi Daerah dan pengembangan Sumber Daya Alam dan Produksi Hortikultura kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi sesuai tugas dan fungsinya.
12. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Kepala Biro Bina Perekonomian dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian dan 9 (sembilan) orang Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:

1. Kabag Administrasi dan Perekonomian Umum

Membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, yaitu :

1. Kasubbag Tata Usaha
2. Kasubbag Perniagaan, Industri dan Promosi
3. Kasubbag Transportasi dan Pariwisata

2. Kabag Pengembangan Ekonomi Daerah

Membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, yaitu :

1. Kasubbag Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat Kurang Sejahtera
2. Kasubbag Pembinaan BUMD
3. Kasubbag Pengendalian Inflasi Daerah

3. Kabag Pengembangan Sumber Daya Alam dan Produksi Hortikultura

Membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, yaitu :

1. Kasubbag Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2. Kasubbag Pengembangan Pangan dan Pertanian
3. Kasubbag Pengembangan Perikanan dan Peternakan

Adapun Struktur Organisasi Biro Bina Perekonomian dapat dilihat pada bagan 1.1.

E. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 41 orang, terdiri dari :

- Pejabat Struktural : 12 orang
- Pejabat Fungsional : - orang
- Tenaga Adm/staf : 29 orang

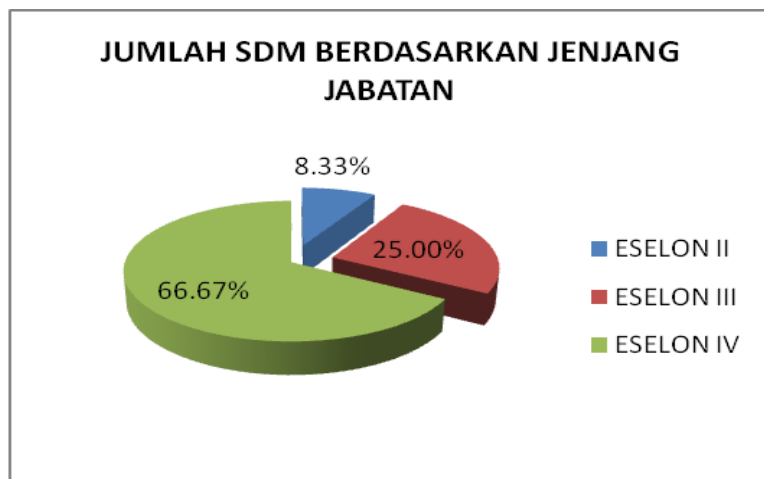
Jumlah 41 orang

Jumlah SDM pada Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu per 31 Desember 2018 sebanyak 41 orang dengan uraian sebagai berikut :

1) Berdasarkan Jenjang Jabatan.

Tabel 1.1 Jumlah SDM Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu Tahun 2018 berdasarkan jenjang jabatan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	8
	Jumlah	12

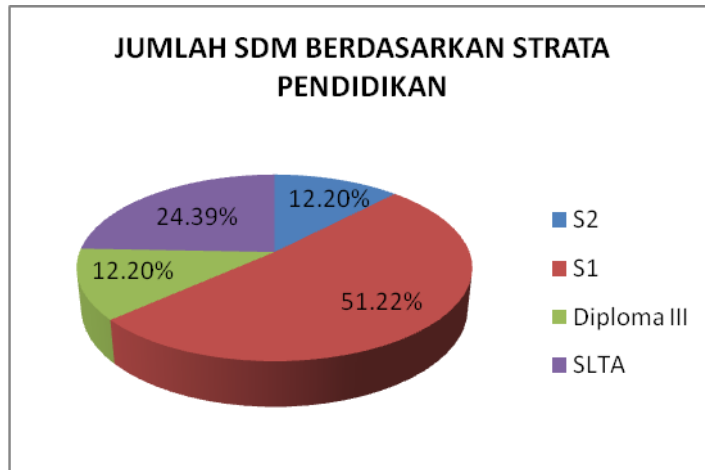


Grafik 1.1 Jumlah SDM berdasarkan jenjang jabatan

2) Berdasarkan strata pendidikan

Tabel 1.2 Jumlah SDM Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu Tahun 2018 berdasarkan strata pendidikan

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	S-3	-
2	S-2	5
3	S-1	21
4	Diploma III	5
5	SLTA	10
6	SLTP	-
	Jumlah	41

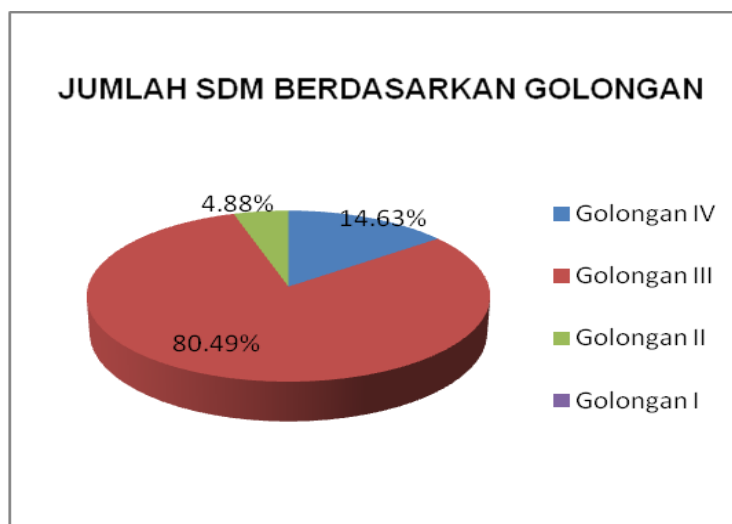


Grafik 1.2 Jumlah SDM Berdasarkan Strata Pendidikan

3) Berdasarkan Golongan.

Tabel 1.3 Jumlah SDM Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu Tahun 2018 berdasarkan golongan

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	6
2	Golongan III	33
3	Golongan II	2
4	Golongan I	-
	Jumlah	41

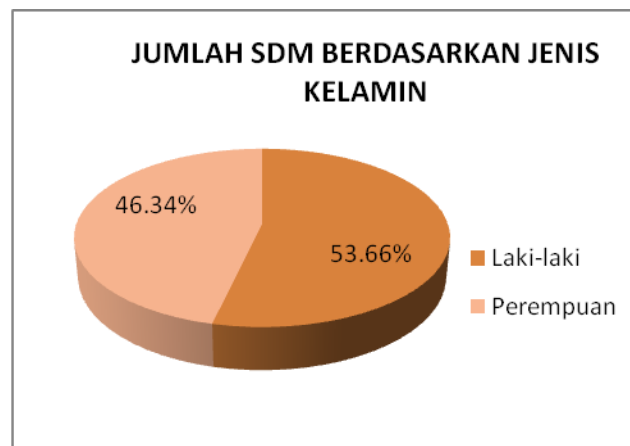


Grafik 1.3 Jumlah SDM berdasarkan Golongan

4) Berdasarkan Jenis Kelamin.

Tabel 1.4 Jumlah SDM Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu Tahun 2018 berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Laki-Laki	22
2	Perempuan	19
	Jumlah	41



Grafik 1.4 Jumlah SDM berdasarkan Jenis Kelamin

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

1. Rencana Strategis (Renstra) Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu.

Visi dan Misi Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu

Visi

"Meningkatkan Peran Serta Para Pelaku Dunia Usaha dan Pelaku Ekonomi dalam Memberdayakan Potensi Daerah serta Kemampuan Daya Saing Produk Daerah untuk Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat".

Misi

Untuk mencapai visi maka disusunlah Misi sebagai berikut :

1. Menciptakan koordinasi dengan SKPD terkait dan kabupaten/kota maupun dengan para pelaku usaha dan ekonomi secara berkesinambungan agar tercipta hubungan kelembagaan yang baik guna menghasilkan iklim usaha yang kondusif bagi tumbuh kembangnya dunia usaha di Sumatera Utara.
2. Meningkatkan Koordinasi dan Pembinaan terhadap Peran BUMD yang berada di Sumatera Utara guna pengembangan potensi ekonomi daerah dan peningkatan daya saing produk daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.

Adapun Program-program yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) yaitu **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah** dan **Program Peningkatan Peran BUMD**.

2. Rencana Kerja (Renja)

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun Program-program yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Rencana Kerja yaitu **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah** dan **Program Peningkatan Peran BUMD**.

B. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja.

Untuk melaksanakan tugas pokok Biro Bina Perekonomiam Setdaprovsu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sebagaimana isu strategis yang berkembang di masyarakat, telah diperjanjikan dalam Kontrak Kinerja (Penetapan Kinerja) Tahun 2018 antara Biro Bina Perekonomiam Setdaprovsu dengan Gubernur Sumatera Utara, ditetapkan Prioritas Program yaitu : **Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah** dan **Program Peningkatan Peran BUMD** dengan Sasaran Strategis berupa **Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Kebijakan Nasional dibidang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Alokasi Pupuk Bersubsidi, Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Pengawasan Garam** dan adapun Indikator Kinerja Utama Biro Bina Perekonomiam Setdaprovsu Tahun 2018 terdiri dari:

1. Jumlah Pembinaan terhadap BUMD yang berdaya saing
2. Frekuensi Koordinasi dalam bidang Alokasi Pupuk Bersubsidi.
3. Frekuensi Koordinasi dan monitoring dalam bidang Pengendalian Harga dan Laju Inflasi.
4. Frekuensi Koordinasi dalam bidang Pengawasan Garam.

Adapun Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Target Kinerja Biro Bina Perekonomian Tahun 2018 yaitu:

1. Koordinasi dan monitoring perkembangan/kegiatan usaha BUMD Pemprovsu.
2. Strategi BUMD Provsu dalam Pengelolaan dan Peningkatan PAD/Deviden.
3. Koordinasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Sumatera Utara.
4. Monitoring dan evaluasi TPID.
5. Monitoring dan Evaluasi Harga 9 (sembilan) bahan pokok dan bahan penting lainnya.
6. Pembinaan dan Pengawasan terhadap peredaran garam, sesuai SK. Gubsu Nomor 188.44/59/kpts/2016 tanggal 29 Januari 2016.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik. Uraian akuntabilitas kinerja Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2018

Sebagaimana telah diperjanjikan dalam kontrak Kinerja (Penetapan Kinerja) Tahun 2018 antara Kepala Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu dengan Gubernur Sumatera Utara, telah ditetapkan Prioritas Program yaitu Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Peningkatan Program Peningkatan Peran BUMD dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018
1.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Kebijakan Nasional dibidang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Alokasi Pupuk Bersubsidi, Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Penyaluran Raskin/Rastra dan Pengawasan Garam.	Jumlah Pembinaan terhadap BUMD yang berdaya saing	6 BUMD
		Frekuensi Koordinasi dalam bidang Alokasi Pupuk Bersubsidi.	32 Kali
		Frekuensi Koordinasi dalam bidang Pengendalian Harga dan Laju Inflasi.	72 kali
		Frekuensi Koordinasi dalam bidang Pengawasan Garam.	9 Kali

Guna mencapai Indikator Kinerja tersebut Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu bekerjasama dan berkoordinasi dengan Kaupaten/Kota, Lembaga-lembaga lain, BUMD terkait dan SKPD Provsu terkait.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Untuk perhitungan persentase pencapaian perjanjian kinerja, Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu menggunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Untuk membuat kesimpulan hasil dari evaluasi kinerja dibuat skala pengukuran kinerja dengan skala pengukuran ordinal:

Tabel 3.2 Klasifikasi Capaian Kinerja

No	Interval	Deskripsi
1.	10-40	Kurang Berhasil
2.	41-70	Cukup Berhasil
3.	71-100	Berhasil
4.	> 100	Sangat Berhasil

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018.

Dalam pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama telah ditetapkan program dan kegiatan yang menunjang tercapainya target yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Perbandingan antara target kinerja dan realisasi capaian kinerja tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3 Perbandingan target dan realiasi capaian kinerja Tahun 2018

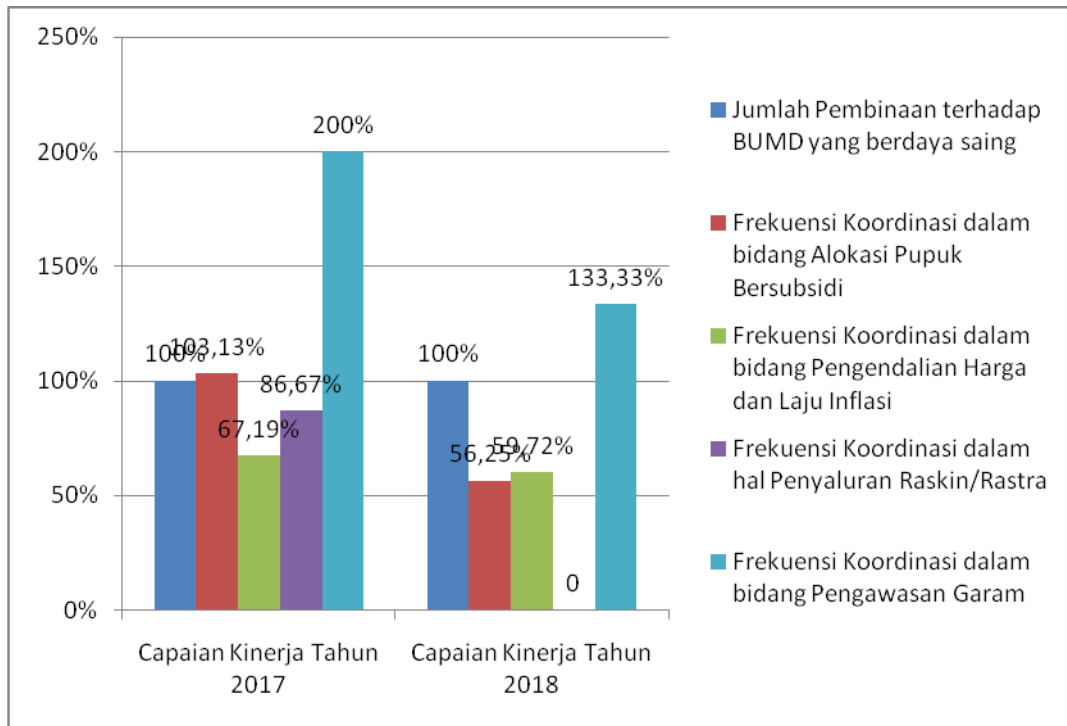
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi 2018	Persentase (%)
1.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Kebijakan Nasional dibidang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Alokasi Pupuk Bersubsidi, Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Penyaluran Raskin/Rastra dan Pengawasan Garam.	Jumlah Pembinaan terhadap BUMD yang berdaya saing	6 BUMD	6 BUMD	100 %
		Frekuensi Koordinasi dalam bidang Alokasi Pupuk Bersubsidi.	32 Kali	18 Kali	56,25%
		Frekuensi Koordinasi dalam bidang Pengendalian Harga dan Laju Inflasi.	72 kali	43 Kali	59,72%
		Frekuensi Koordinasi dalam bidang Pengawasan Garam.	6 Kali	8 Kali	133,33%

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja (%)	
							2017	2018
1.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Kebijakan Nasional dibidang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Alokasi Pupuk Bersubsidi, Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Pengawasan Garam.	Jumlah Pembinaan terhadap BUMD yang berdaya saing	6 BUMD	6 BUMD	6 BUMD	6 BUMD	100,00	100,00
		Frekuensi Koordinasi dalam bidang Alokasi Pupuk Bersubsidi.	32 Kali	33 Kali	32 Kali	18 Kali	103,13	56,25
		Frekuensi Koordinasi dalam bidang Pengendalian Harga dan Laju Inflasi.	64 kali	43 kali	72 kali	43 Kali	67,19	59,72
		Frekuensi Koordinasi dalam hal Penyaluran Raskin/Rastra.	30 kali	26 kali	-	-	86,67	-
		Frekuensi Koordinasi dlm bdg Pengawasan Garam.	6 Kali	12 Kali	6 Kali	8 Kali	200,00	133,33

Perbandingan realisasi tahun 2018 dengan tahun 2017 dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 3.1 Perbandingan realisasi tahun 2018 dengan tahun 2017

3. Perbandingan target kinerja sampai tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Adapun perbandingan target kinerja tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan target 2018 dengan Target Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Target Renstra
1.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian	Jumlah Pembinaan terhadap BUMD yang berdaya saing	6 BUMD	6 BUMD

Kebijakan Nasional dibidang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Alokasi Pupuk Bersubsidi, Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Penyaluran Raskin/rastra dan Pengawasan Garam.	Frekuensi Koordinasi dalam bidang Alokasi Pupuk Bersubsidi.	32 Kali	32 Kali
	Frekuensi Koordinasi dalam bidang Pengendalian Harga dan Laju Inflasi.	72 kali	72 kali
	Frekuensi Koordinasi dalam bidang Pengawasan Garam.	6 Kali	6 Kali

Pada tabel di atas perbandingan antara target yang ada di perjanjian kinerja dengan target yang ada di Perencanaan Strategis adalah 100% yang artinya antara target Perjanjian Kinerja dengan target di Perencanaan Strategis sesuai atau sinkron.

4. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis dan kinerja utama diperlukan sumber daya. Adapun sumber daya terbagi dalam dua golongan yaitu sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Perlu dilakukan analisis pada kedua sumber daya tersebut antara tahun evaluasi dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2017 diperlukan anggaran untuk kegiatan yang sama sebesar Rp. 1.038.645.500 sedangkan untuk tahun 2018 diperlukan anggaran untuk kegiatan yang sama sebesar Rp. 838.721.808. Dapat dilihat dari tahun 2017 ke tahun 2018 telah terlaksana efisiensi anggaran pendukung sasaran strategis dimana anggaran pada tahun 2018 untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut lebih kecil dari tahun 2017. Hal itu dikarenakan Indikator Penyaluran Rastra tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan pendukung keberhasilan indikator tersebut telah dialihkan ke Dinas Sosial ProvSU.

Dari segi sumber daya manusia dapat pula kita lakukan analisis efisiensinya. Pada tahun 2017 jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan

dalam pencapaian masing-masing kegiatan yang mendukung sasaran strategis adalah sebanyak 25 pns yang terdiri dari kepala bagian, kepala sub bagian dan staf yang membidangi kegiatan tersebut dan pada tahun 2018 sebanyak 21 pns yang terdiri dari kepala bagian, kepala sub bagian dan staf yang membidangi kegiatan tersebut.

Jika kita melihat perbandingan antara tahun 2017 dengan tahun 2018 maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dibutuhkan pada tahun 2017 lebih banyak.

Perbandingan anggaran dan SDM yang dibutuhkan pada Tahun 2017 dengan tahun 2018 dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.6 Perbandingan kebutuhan jumlah anggaran dan jumlah SDM pada Tahun 2017 dan Tahun 2018.

Tahun Perbandingan	Jumlah Anggaran	Jumlah SDM
Tahun 2017	1.084.150.000	25 pns
Tahun 2018	838.721.808	21 pns

Adapun hasil-hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan penunjang indikator kinerja utama tersebut adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan kegiatan:

1. Koordinasi dan monitoring perkembangan/kegiatan usaha BUMD PemprovSU

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki 6 (enam) BUMD, Dimana kedudukan Gubernur Sumatera Utara selaku Pemilik dan Pemegang Saham Mayoritas terbanyak, yaitu :

- PT. Dhirga Surya Sumatera Utara;
- PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;
- PD. Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara;
- PT. Perkebunan Provinsi Sumatera Utara;
- PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara dan;
- PT. Bank Sumut.

Selain BUMD diatas, Pemprovsu menyertakan saham pada 2 BUMN, yaitu:

- PT. KIM Persero;
- PT. Asuransi Bangun Askrida

Hasil-hasil yang dicapai dari masing-masing BUMD adalah sebagai berikut :

a. PT. DHIRGA SURYA SUMATERA UTARA :

- Untuk meningkatkan fleksibilitas dalam menjalankan operasional perusahaan, telah dilakukan proses perencanaan penggabungan BUMD Provusu, yaitu Ranperda Penggabungan PD. Aneka Industri dan Jasa Provusu ke DPRD Sumatera Utara,
- Penambahan dan mengotimalkan core business perusahaan yang sudah berjalan yaitu pendidikan/pelatihan perhotelan dan travel agen, sarana pelayanan kesehatan komersil, dan MICE
- Proses pengajuan kerjasama dalam pengelolaan Mess Pemda milik Pemprov. Sumatera Utara antara lain di Mes Parapat atau Mes T. Rizal Nurdin serta pengelolaan Gedung Serbaguna Jl. Willem Iskandar yang akan dikelola oleh PT. Dhirga Surya, sampai saat ini belum bisa diproses.

b. PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA

- Untuk meningkatkan kapasitas produksi air bersih PDAM Tirtanadi akan melakukan peningkatan kapasitas IPA Sunggal 2600 liter/detik, IPA Deli tua 200 liter/detik. Khusus untuk IPA Deli Tua, akan ditambah jumlah kapasitas produksi air dari 200 liter / detik menjadi 400 liter / detik.
- Disamping itu saat ini dilakukan Pembangunan Instalasi air dengan pihak Tirta Lyonase untuk extension 400 liter/detik dan untuk peningkatan kapasitas produksi sebesar 240 liter/detik di IPA Denai.

- Dalam rangka meningkatkan pelayanan pembayaran rekening air pelanggan PDAM Tirtanadi telah melaksanakan pembayaran rekening air dengan online system yang bekerjasama dengan Perbankan BUMD ataupun Nasional, seperti Bank Sumut, Bank Mandiri, Bank BRI dan lain – lain
- Perencanaan pelepasan KSO antara PDAM Tirtanadi Provsu dengan PDAM Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang sudah dilaksanakan,
- Kenaikan Tarif Air Minum PDAM Tirtanadi Provsu tidak ada.
- Pembuatan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang PDAM Tirtanadi Provsu.
- KSO antara PDAM Tirtanadi Provsu dengan PDAM Tirta Malem sudah berakhir pada tahun 2017. Perpanjangan kerjasama operasional (KSO) sudah dibicarakan atau dimusyawarahkan oleh kedua pihak dan akan dilanjutkan untuk KSO berikutnya.

c. PD. ANEKA INDUSTRI DAN JASA PROVINSI SUMATERA UTARA

- Saat ini sedang melakukan peninjauan kerjasama dengan Dinas Tarukim untuk pembangunan Rusunawa di atas tanah milik PD. Aneka Industri dan Jasa eks Pabrik Batu Teladan.
- Telah melakukan pertemuan intensif dan pelaksanaan untuk kerjasama pembangunan gedung AIJ Building di atas tanah milik PD. Aneka Industri dan Jasa Jl. Putri Merak Jingga.
- Proses kerjasama pengoptimalan aset Bioskop Riang Pematang Siantar melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga dengan pola BOT harus dimaksimalkan.
- Peninjauan Aset PD. AIJ Sumut di Kuala simpang - Kab. Aceh Tamiang Prov. Aceh, untuk rencana pelepasan asset atau penjualan kepada Pemkab. Aceh Tamiang segera dilaksanakan, mengingat asset tersebut sudah sangat tidak

layak untuk dipergunakan kembali dan bisa menambah modal Perusahaan.

- Gedung Jalan Jend. A. Yani Medan Kesawan telah digunakan untuk Kantor PD. Aneka Industri dan Jasa Provsu.
- Rencana Penggabungan antara PD. AIJ Provsu dengan PT. Dhirga Surya Sumut sampai saat ini belum ada kejelasan.

d. PT. PERKEBUNAN SUMATERA UTARA

- Pemberhentian jajaran Dewan Komisaris PT. Perkebunan Sumatera Utara periode 2017 – 2022.
- Melakukan revitalisasi perkebunan lahan plasma untuk masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal melibatkan masyarakat dan koperasi sebanyak 950 KK dan pembangunan kebun Kampung Baru di Kabupaten Mandailing Natal.
- Telah disahkan Perda Penyertaan modal PT. Perkebunan Sumut.
- Penambahan penyertaan Modal Pemerintah Provsu kepada PT. Perkebunan Sumatera Utara sebesar Rp. 42 Milyar

e. PT. PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA

- Bekerjasama dengan Pertamina untuk pembangunan Independen Power Plan di Sumatera Utara.
- Membuka dan memperbaharui MOU jalur baru KMP Sumut 1 dan 2, yaitu Jalur Simanindi Kab. Samosir – Tiga Ras Kab. Simalungun, Sipinggan – Muara dan Onan Runggu – Balige (Kab. Toba Samosir)
- Melakukan koordinasi dengan Pemkab Labuhan Batu Utara terkait pengelolaan blok migas Asahan dan di Kab. Padang Lawas tentang pengelolaan Blok migas Blok Tonga.
- Melakukan koordinasi dan monitoring Ranperda Pembentukan BUMD Baru di Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Padang Lawas.

- Permohonan penyertaan modal dalam bentuk pertapakan tanah ke PD. AIJ Sumut.

f. PT. BANK SUMUT

- Bank Sumut disarankan untuk menambah penyertaan modal
- Bank Sumut telah mendapatkan penambahan penyertaan modal dasar dari Rp. 78 Miliar tahun 2018 dari Pemprovsumu.
- Koordinasi Dana CSR ke PT. Bank Sumut dan melakukan pengawasan secara administrasi proposal dari masyarakat untuk penggunaan dana CSR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pengangkatan Dewan Komisaris Independent PT. Bank Sumut
- Pembukaan Kantor Cabang Kota Batam dan Tello – Nias.

Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Perkembangan / Kegiatan Usaha BUMD tersebut dilaksanakan dalam rangka perjalanan dinas Luar Provinsi, antara lain :

- Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan monitoring perkembangan/ kegiatan usaha BUMD di Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Koordinasi dan monitoring dimaksud dilaksanakan di wilayah :
 1. Kabupaten Serdang Bedagai
 2. Kabupaten Tapanuli Tengah
 3. Kota Tebing Tinggi.
 4. Kota Sibolga
 5. Kota Pematang Siantar
 6. Kabupaten Mandailing Natal.
 7. Kabupaten Samosir
 8. Kabupaten Humbang Hasundutan.
 9. Kabupaten Toba Samosir
 10. Kabupaten Padang Lawas.
 11. Kabupaten Labuhan Batu Utara.

12. Kabupaten Padang Lawas Utara.
13. Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sedangkan di Luar Provinsi Sumatera Utara antara lain :

1. DKI Jakarta
2. Prov. Banten
3. Prov. Jawa Timur
4. Kota Batam.
5. Prov. Aceh (Kab. Aceh Tamiang dan Kota Lhokseumawe).

- Menghadiri Rapat dengan Kementerian dalam Negeri RI.
- Melakukan koordinasi dan konsultasi tentang pembinaan BUMD ke Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian BUMN RI di Jakarta.
- Menghadiri Bintek dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.
- Mendampingi Anggota DPRD Sumut ke Kantor Gubernur DKI Jakarta ataupun ke Badan Pembinaan BUMD Prov. DKI Jakarta di Jakarta.
- Mendampingi Kepala Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu ke Kota Batam, dalam rangka pembukaan dan Peresmian Kantor Cabang PT. Bank Sumut Batam dan Tello – Nias.
- Melakukan koordinasi dan konsultasi tentang Penjajakan Ranperda Konsep pembentukan BUMD Pangan Prov. Sumut bersama dengan anggota DPRD Sumut Komisi C atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sumut.

2. Strategi BUMD dalam Pengelolaan dan Peningkatan PAD/Deviden.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi tentang Strategi BUMD dalam meningkatkan PAD/Deviden yang bertempat di Hotel Madani Jl. Sisingamangaraja / Jl. Amaliun No. 1 Medan pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2018. Acara ini menghadirkan peserta, antara lain :

- Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten / Kota se Sumatera Utara.
- BUMD Pemprov
- Dinas / Instansi terkait

Jumlah Peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang.

Acara Sosialisasi Pendirian BUMD Pemerintah Kabupaten / Kota ini menghadirkan Narasumber, antara lain yaitu :

- a. Kementerian Dalam Negeri RI
- b. Kadis Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu
- c. Ka. Bappedasu
- d. Karo Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu.

Melalui acara ini diharapkan kepada para Peserta agar memahami dan meningkatkan pengetahuan kepada para peserta untuk mencukupi kebutuhan pendanaan penyediaan infrastruktur secara berkelanjutan melalui pengerahan dana swasta, sehingga tercipta penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu.

3. Koordinasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Sumatera Utara.

Terlaksananya monitoring dan koordinasi terkait dengan penyaluran dan pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida ke Kabupaten / Kota di Sumatera Utara (1) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian RI di Jakarta, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Samosir, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Toba Samosir, Kota Pematang Siantar, Kota Tanjung Balai dan (semua Kabupaten / Kota kecuali Medan dan 5 Kabupaten / Kota di Pulau Nias), sementara Kota Sibolga tidak ikut menerima kuota Pupuk Bersubsidi.

Terkoordinirnya penerbitan Peraturan Bupati/Walikota dalam rangka percepatan penyaluran Pupuk dan Pestisida di Provsu.

Terlaksananya rapat antara KP3 Provinsi Sumatera Utara dengan KP3 Kabupaten / Kota se- Sumatera Utara dalam rangka peningkatan kinerja terkait pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida.

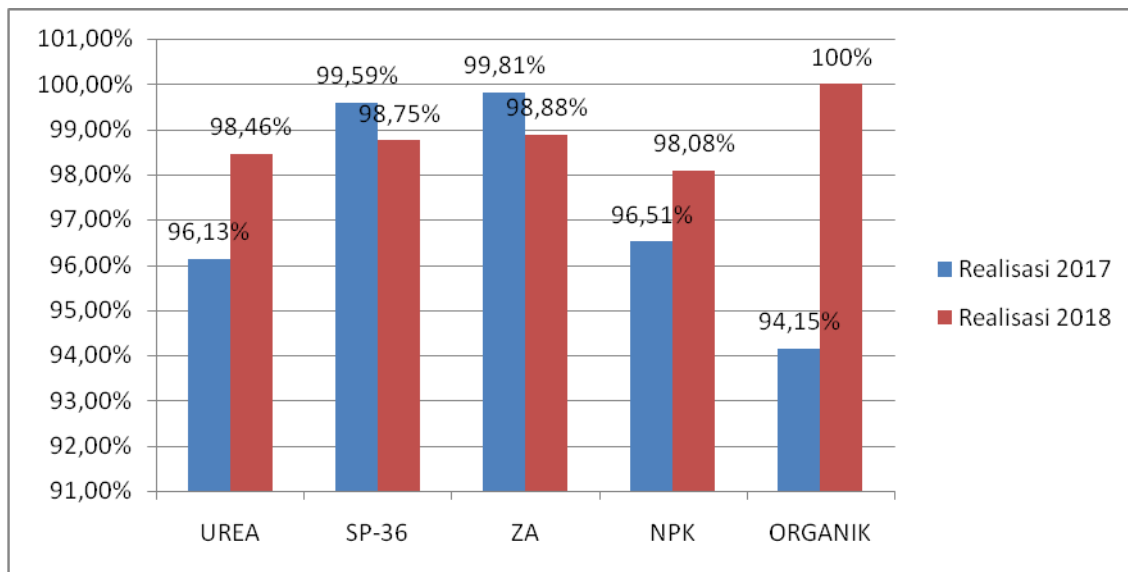
Tabel 3.7 Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menurut jenisnya di Sumatera Utara Tahun 2018, antara lain :

No	Jenis Pupuk	Alokasi Kebutuhan	Realisasi (Ton)	Persentase (%)
			s/d Desember	Setahun
1	UREA	168.732	166.138,50	98,46
2	SP-36	50.090	49.462,45	98,75
3	ZA	55.330	54.710,10	98,88
4	NPK	143.540	140.782,25	98,08
5	ORGANIK	19.700	19.775	100,00

Dibandingkan Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menurut jenisnya di Sumatera Utara Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 3.8 Realisasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2017

No	Jenis Pupuk	Alokasi Kebutuhan	Realisasi (Ton)	Persentase (%)
			s/d Desember	Setahun
1	UREA	171.640	164.995,6	96,13
2	SP-36	53.121	52.901,6	99,59
3	ZA	45.227	45.139,6	99,81
4	NPK	127.610	123.157,5	96,51
5	ORGANIK	20.868	19.648,2	94,15



Grafik 3.2 Perbandingan Persentase Realisasi Pupuk Tahun 2017 dengan Tahun 2018

4. Monitoring dan evaluasi TPID

Dalam rangka memperoleh data Perkembangan Inflasi setiap bulan pada awal pertama kerja tetap mengikuti Rilis Perkembangan Inflasi oleh Badan Pusat Statistik di Kabtor BPS Provinsi Sumatera Utara dan segera dilaporkan Perkembangan Inflasi kepada Gubernur Sumut.

Pada pencapaian Inflasi Sumatera Utara sebesar 1,23 persen berada dibawah Inflasi Nasional sebesar 3,13 Persen. Dan Inflasi Sumatera Utara tercapai dan terealisasi di bawah Target Nasional 3,5 + 1 Persen.

Hal ini terjadi karena TPID Kabupaten Kota terus bekerja keras mulai dengan pembenahan Peningkatan Produksi sampai kepada Distribusi dan Tata Niaga yang semakin baik, dan juga memberdayakan Satgas Pangan bila ada penimbun atau yang membuat spekulasi harga.

Secara umum Pengendalian Inflasi di Sumatera Utara terkendali dengan baik artinya Ketersediaan Barang dan jasa tetap tersedia begitu juga dengan keterjangkauan harga masih dapat dijangkau oleh masyarakat.

- Pelaksanaan Rakorprov untuk semester I Tahun 2018 dilaksanakan di Medan pada bulan Mei 2018 di Hotel JW. Mariot Medan.

- Pelaksanaan Rakorprov untuk semester II Tahun 2018 dilaksanakan di Jakarta pada bulan Nopember 2018 di Jakarta sekaligus Peninjauan 3 BUMD guna mengetahui pentingnya peran BUMD mewujudkan kerjasama suatu daerah.
- Kabupaten/Kota telah melakukan kerjasama antar daerah seperti Kota Sibolga dengan Kabupaten Humbang Hasundutan dan TPID Humbang Hasundutan dengan TPID Kota Medan.

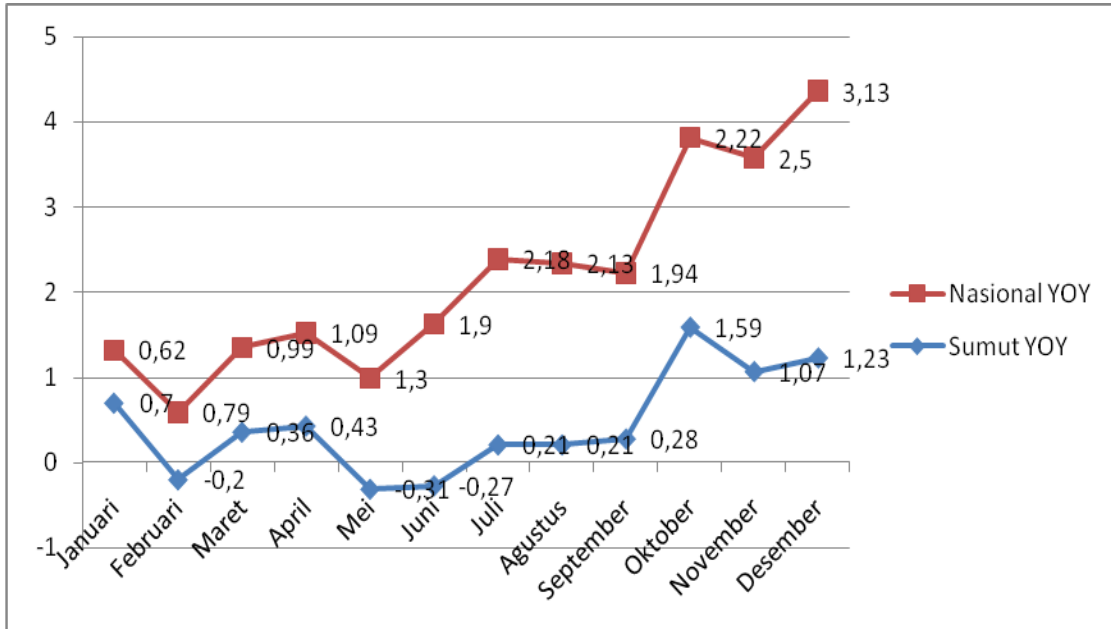
Adapun perkembangan tingkat inflasi Sumut dengan Inflasi Nasional s.d Desember 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9 Perkembangan Inflasi Sumut dengan Inflasi Nasional

NO	THN 2018	MEDAN		P.SIANTAR		SIBOLGA		P.SIDEMPUAN		SUMUT		NASIONAL	
		KOM	YOY	KOM	YOY	KOM	YOY	KOM	YOY	KOM	YOY	KOM	YOY
1.	JAN	0,71	0,71	0,54	0,54	1,28	1,28	0,28	0,28	0,70	0,70	0,62	0,62
2.	FEB	-0,96	-0,25	-0,58	-0,04	-0,50	0,78	-0,58	-0,31	-0,89	-0,20	0,17	0,79
3.	MAR	0,61	0,36	0,17	0,12	0,79	1,57	0,33	0,02	0,56	0,36	0,20	0,99
4.	APR	-0,01	0,36	0,56	0,69	-0,64	0,92	0,76	0,78	0,06	0,43	0,10	1,09
5.	MEI	-0,86	-0,51	-0,01	0,68	-0,07	0,85	-0,55	0,23	-0,74	-0,31	0,21	1,30
6.	JUNI	0,01	-0,50	0,10	0,79	0,29	1,14	0,38	0,61	0,04	-0,27	0,59	1,90
7.	JULI	0,49	-0,01	0,35	1,14	0,62	1,76	0,53	1,14	0,48	0,21	0,28	2,18
8.	AGUS	0,01	-0,01	0,07	1,20	-0,37	1,38	0,01	1,15	0,00	0,21	-0,05	2,13
9.	SEPT	0,09	0,09	-0,24	0,96	0,39	1,78	0,04	1,19	0,07	0,28	-0,18	1,94
10.	OKT	1,44	1,53	0,80	1,77	1,24	3,05	0,11	1,30	1,31	1,59	0,28	2,22
11.	NOV	-0,64	0,88	-0,01	1,76	-0,28	2,76	0,50	1,81	-0,51	1,07	0,27	2,50
12.	DES	0,12	1,00	0,38	2,15	0,10	2,86	0,41	2,22	0,15	1,23	0,62	3,13

Secara umum perkembangan inflasi Sumut dan Nasional dapat dilihat dari grafik sebagai berikut :

Grafik 3.3 Perkembangan Inflasi Sumut dengan Inflasi Nasional



Pada tahun 2018 monitoring dan evaluasi terkait dengan Tim Pengendalian Inflasi (TPID) ke Kabupaten / Kota di Sumatera terlaksana di beberapa kab/kota seperti:

1. Kota Tebing Tinggi
2. Kota Padangsidempuan.
3. Kota Sibolga
4. Kota Pematang Siantar.
5. Kota Tanjung Balai
6. Kab.Karo
7. Kab. Padang Lawas Utara
8. Kab. Padang Lawas.
9. Kab.Labuhan Batu Selatan.
10. Kab.Labuhan Batu Utara.
11. Kab.Langkat
12. Kab.Tapanuli Selatan
13. Kab. Serdang Bedagai
14. Kab. Tapanuli Tengah
15. Kab. Samosir.
16. Kab.Simalungun.
17. Kab.Phakpak Barat.

18. Kab.Dairi.
19. Kab.Toba Samosir
20. Kab.Tapanuli Utara
21. Kab.Deli Serdang

5. Monitoring dan Evaluasi Harga 9 (sembilan) bahan pokok dan bahan penting lainnya.

Pada tahun 2017 monitoring dan evaluasi harga sembako dan bahan penting lainnya ke beberapa Kabupaten / Kota di Sumatera Utara, yaitu :

1. Kab.Labuhan Batu Utara
2. Kabupaten Dairi
3. Kab.Tapanuli Utara
4. Kab.Tapanuli Selatan
5. Kabupaten Batubara
6. Kota Pematang Siantar.
7. Kota Padangsidempuan
8. Kab.Simalungun.
9. Kota Binjai
10. Kab.Langkat.
11. Padang Lawas Utara
12. Kota Tanjung Balai.
13. Kab.Batubara
14. Kab.Labuhan Batu
15. Kota Sibolga
16. Kab.Samosir
17. Kab.Labuhan Batu Selatan
18. Kab.Pakpak Barat
19. Kab.Padang Lawas.
20. Kab.Tapanuli Tengah

Telah dibentuk Satgas Pangan pada bulan Juni 2017 dengan SK Gubernur Sumatera Utara No.188.44/372/KPTS/2017 tanggal 10 Juli 2017 untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi jika terjadi gejolak harga, apakah ada distributor yang bermain yang ingin membuat agar harga bergejolak, apakah ada penimbun penimbun barang.

Dan telah dilakukan beberapa kali Rapat Ketersediaan menjelang Bulan Ramadhan dan Idul Fitri dan jelang HBKN Natal dan Tahun Baru 2018.

Sedangkan untuk Tahun 2018 monitoring dan evaluasi dilaksanakan di kab/kota terdiri dari:

1. Kota Binjai
2. Kota Tebing Tinggi
3. Kota Padangsidempuan
4. Kab. Tapanuli Utara
5. Kab. Pematangsiantar
6. Kab. Pakpak Bharat
7. Kab. Langkat
8. Kab. Padang Lawas
9. Kab. Karo/Kab. Deli Serdang
10. Kab. Sergai
11. Kab. Dairi
12. Kab. Simalungun
13. Kab. Toba Samosir

Harga Bahan Pokok terjangkau, untuk Tahun 2018 dapat terealisasi dengan baik, hal ini dapat dilihat sewaktu HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 1439 H dan menjelang Natal dan Tahun Baru harga Bahan Pokok dan Bahan Penting lainnya tidak terjadi kenaikan harga atau fluktuasi harga yang dapat mengakibatkan tambahan beban kepada masyarakat, juga dengan kerja sama dengan satgas pangan tidak ada distributor yang sengaja menimbun yang dengan tujuan menimbulkan gejolak harga dan telah melakukan monev ke 13 Kab/Kota.

6. Monitoring dan Evaluasi penyaluran Raskin/Rastra di Sumut.

Pada Tahun 2018 ini, kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran raskin/rastra telah dialihkan ke Dinas Sosial Provsu.

Namun realisasi kinerja Tahun 2017 dapat kami jelaskan bahwa koordinasi dilaksanakan sebanyak 11 kali di beberapa kab/kota antara lain koordinasi dan monitoring ke Kab. Nias, Kab. Nias Selatan, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai, Kota Tebing, Kab. Batubara, Kab. Tapanuli Utara, Kota Binjai, Kab. Mandailing Natal.

Raskin/Rastra di Sumatera Utara tahun 2016 telah tersalur dan terdistribusikan di 33 kab/kota dengan jumlah RTS-PM sebanyak 746.220 penerima dengan realisasi penyaluran raskin sebesar 134.298.795 kg raskin dari target sebesar 134.319.600 kg. Penyaluran dan pendistribusian raskin telah mencapai 99.98 %.

Sedangkan kab/kota yang tidak menyalurkan raskin reguler 100 % adalah sebagai berikut:

- Nias 99,52%
- Nias Selatan 99,81%
- Nias Utara 99,97%

Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyaluran Raskin/Rastra di Sumatera Utara di tahun 2017 ke 26 Kabupaten/Kota yaitu: Kab. Mandailing Natal, Kab. Paluta, Kab. Palas, Kab. Labuhan Batu, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Labusel, Kab. Toba Samosir, Kab. Taput, Kab. Labura, Kab. Tapteng, Kab. Langkat, Kab. Dairi, Kab. Humbahas, Kab. Tapsel, Kab. Tapteng, Kab. Batubara, Kab. Asahan, Kab. Tapteng, Kab. Samosir, Kota Tanjung Balai, Kota Padangsidimpuan, Kota Pematang Siantar, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Sibolga.

Hasil monitoring dan evaluasi penyaluran Raskin/Rastra Kabupaten/Kota jumlah KPM $632.755 \times 15 \text{ Kg} \times 12 \text{ bulan} = 113.895.900 \text{ Kg}$, dengan relisasi telah mencapai 100%.

7. Pembinaan dan Pengawasan terhadap peredaran garam, sesuai SK. Gubsu Nomor 188.44/59/kpts/2016 tanggal 29 Januari 2016.

Tahun 2017 kegiatan Komite Nasional Garam (KNG) ProvSU terlaksana dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran garam dalam pemenuhan kebutuhan garam di Sumatera Utara yang memenuhi SNI perlu mendapat pengawasan sejak pemasukan sampai peredaran di pasar, untuk itu PemprovSU telah membentuk KNG ProvSU melalui Keputusan Gubsu No.188.44/59/KPTS/2016 tgl. 29 Januari 2016 tentang Komite Garam Nasional (KNG) Provinsi Sumatera Utara dan telah direvisi

menjadi Keputusan Gubsu No.188.44/402/KPTS/2017 tgl. 21 Agustus 2017 tentang Komite Nasional Garam (KNG) Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu untuk menguatkan posisi KNG Provsu sebagai Komite yang mengawasi garam baik itu bahan baku beryodium maka telah diterbitkan Perda Provsu No.7 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengadaan dan Peredaran Garam di Provsu. KNG Provsu dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kepada perusahaan pemasok garam dimintakan agar dalam memasukan garam ke Sumatera Utara agar dapat memenuhi ketentuan yang berlaku. Begitu juga kepada pengusaha Yodisasi maupun perusahaan pengemasan garam agar tetap berpedoman kepada persyaratan SNI maupun ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI No.42/M-Ind/Per/11/2005 tgl. 29 Nopember 2005 tentang Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam.

Terlaksananya kegiatan monitoring, pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran garam di Kabupaten/Kota Sumatera Utara yaitu Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota P.Sidimpuan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Batubara.

Sedangkan pada Tahun 2018 kegiatan monitoring, pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran garam di Kabupaten/Kota Sumatera Utara yaitu Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Dairi, Kota Sibolga, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Medan.

Pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap peredaran garam di PT. Budiono Madura Bangun Persada yang beralamat di Jl. Pasar Lama Lingkungan X-B, Pekan Pelabuhan Kec. Medan Labuhan didapatkan temuan sebagai berikut :

1. Untuk sementara perusahaan tidak melakukan proses produksi garam konsumsi dikarenakan gudang sedang renovasi.
2. Saat ini kegiatan perusahaan hanya menjual garam untuk kebutuhan industry ikan.

3. Garam berasal dari Madura yaitu garam bahan baku dan garam konsumsi produksi PT. Budiono Madura Bangun Persada.
4. Berdasarkan hasil uji terhadap garam kemasan menunjukkan bahwa telah memenuhi persyaratan SNI (70PPM).

Sedangkan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap peredaran garam di PT. Sumatera Palm Raya (SPR) yang beralamat di Jl. Pasar Yos Sudarso Km. 11 Kota Bangun didapatkan temuan sebagai berikut :

1. PT. SPR merupakan perusahaan industry garam konsumsi (bukan garam industry).
2. Bahan baku garam berasal dari Madura sebanyak 60 ton per hari, produksi kemasan karung putih (garam halus) dan beryodium sedangkan karung biru (garam kasar) non yodium (tergantung permintaan konsumen).
3. Berdasarkan hasil uji terhadap kadar iodium menunjukkan hasil kadar iodium telah memenuhi persyaratan SNI (58 PPM).

C. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran strategis Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu, yaitu pada Program Peningkatan Kapasitas Kelembagan Pemerintah Daerah, Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu sesuai mempunyai dana sebesar **Rp. 838.721.808,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 560.403.700,-** atau sebesar 66,82 % dan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.10 Realisasi Program/Kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama TA. 2018.

No	PROGRAM / KEGIATAN	APBD	PAPBD	REALISASI	
				Rp.	%
1.	Koordinasi dan monitoring perkembangan/kegiatan usaha BUMD Pemprov	149.617.993	149.617.993	114.524.900	76,54
2.	Strategi BUMD Provsu dalam Pengelolaan dan Peningkatan PAD/Deviden	74.641.650	67.671.650	59.721.000	88,25

3.	Koordinasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Sumatera Utara	199.957.242	179.617.242	110.591.600	61,57
4.	Monitoring dan evaluasi TPID	234.822.893	165.810.893	151.627.200	91,45
5.	Monitoring dan Evaluasi Harga 9 (sembilan) bahan pokok dan bahan penting lainnya	89.682.680	64.432.680	60.446.000	93,81
6.	Pembinaan dan Pengawasan terhadap peredaran garam, sesuai SK. Gubsu Nomor 188.44/59/kpts/2016 tanggal 29 Januari 2016	89.999.350	72.921.350	89.999.350	87,07

Dari evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis program berdasarkan perbandingan realisasi dan target pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 dapat kita simpulkan perbandingan klasifikasi capaian kinerja (perbandingan persentase anggaran dengan kinerja) Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 3.11 Perbandingan Deskripsi Realisasi Anggaran dengan Realisasi Capaian Kinerja

No.	Indikator Kinerja Utama	% Realisasi Anggaran	Deskripsi	% Realisasi Kinerja	Deskripsi
1.	Jumlah Pembinaan terhadap BUMD yang berdaya saing	82,40 %	Berhasil	100,00	Berhasil
2.	Frekuensi Koordinasi dalam bidang Alokasi Pupuk Bersubsidi.	61,57%	Cukup Berhasil	56,25%	Cukup Berhasil
3.	Frekuensi Koordinasi dan monitoring dalam bidang Pengendalian Harga dan Laju Inflasi	92,63%	Berhasil	59,72%	Cukup Berhasil
4.	Frekuensi Koordinasi dalam bidang Pengawasan Garam.	87,07%	Berhasil	133,33%	Sangat Berhasil

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa Realisasi Anggaran yang mendukung berhasilnya kinerja Indikator Kinerja Utama Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu masih dapat dikatakan cukup selaras dengan Realisasi Kinerjanya.

Sehingga Realisasi Capaian Kinerja Sasaran strategis **"Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Kebijakan Nasional dibidang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Alokasi Pupuk Bersubsidi, Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Penyaluran Raskin/Rastra dan Pengawasan Garam** jika di rata-ratakan dari segi capaian kinerja adalah sebesar **87,33%** atau dengan kategori BERHASIL sedangkan dari segi penggunaan anggaran adalah sebesar **80,92%** dengan kategori BERHASIL.

D. Pengungkapan Perbaikan Kinerja Selanjutnya

Kebijaksanaan pada dasarnya adalah ketentuan yang ditetapkan untuk menjadi pedoman, pegangan dan arah dalam mencapai tujuan dan sasaran agar diimplementasikan melalui program dan kegiatan secara operasional. Melalui analisis lingkungan internal dan eksternal dalam pencapaian tujuan dan sasaran maka dipandang perlu untuk menetapkan strategi pencapaian target.

Untuk meningkatkan kinerja guna mencapai realisasi visi misi yang telah ditetapkan perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan di masa mendatang sebagai berikut :

- a. Meningkatkan hubungan kerja yang harmonis dengan instansi terkait maupun kab/kota.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait guna mendukung pemantapan keberhasilan kinerja.
- c. Meningkatkan kemampuan aparatur Biro Bina Perekonomian agar terciptanya aparatur yang berdaya saing dalam hal peningkatan capaian kinerja yang baik.

- d. Lebih mematangkan perencanaan program/kegiatan yang mendukung keberhasilan tugas dan fungsi Biro Bina Perekonomian.
- e. Memantapkan prosedur kerja dan tata kerja.
- f. Mengutamakan budaya kerja dan disiplin kerja.
- g. Adanya komitmen bersama antara pimpinan dan staf Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu.

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja (LK) Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu Tahun 2018 ini adalah gambaran terhadap pencapaian kinerja yang dilaksanakan oleh Biro Bina Perekonomian sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.

Dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama di dalam laporan ini dapat disimpulkan bahwa capaian Kinerja Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu baik dilihat dari segi Pencapaian Kinerja Kegiatan maupun Pencapaian Sasaran berhasil dengan sangat baik, karena masing-masing kegiatan telah terlaksana sesuai yang diprogramkan dan telah mencapai sasaran sesuai target yang telah ditetapkan bahkan di beberapa kegiatan melebihi target kinerja yang direncanakan di awal tahun. Sementara untuk realisasi anggaran Biro Bina Perekonomian mencapai Capaian Anggaran dengan rata-rata 80,92%.

Perlunya di tahun-tahun mendatang dalam mempertahankan ataupun meningkatkan kinerja masing-masing bidang agar tetap tercapainya Capaian Kinerja yang tinggi berorientasi kepada hasil yang maksimal dan berkualitas sebagai wujud dari pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Demikian Laporan Kinerja Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu ini disampaikan sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban atas kinerja yang dicapai selama periode tahun berjalan untuk menciptakan laporan yang akuntabel guna menunjang tercapainya *good governance* dan *clean governance* dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang sejahtera.

Medan, 14 Februari 2019

KEPALA BIRO BINA PEREKONOMIAN
SETDAPROVSU



Ernita Bangun, SE, MAP
Pembina Utama Muda
NIP 196103271981032002